

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Peranan

Pengertian mengenai peranan memiliki keterkaitan dengan suatu status tertentu, atau peranan akan nampak bila manusia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Peranan (*role*) adalah tingkah laku yang diwujudkan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu. Kedudukan (*status*) adalah kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain (Dellyana, 1988).

Konsep peranan merupakan satu dari seperangkat istilah yang digunakan dalam mempelajari perilaku individu. Peranan berasal dari kata peran dan mengandung arti seperangkat tingkah laku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

Peranan mencakup tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi tertentu dalam suatu sistem sosial.

Peranan adalah pola tingkah laku individu dan saling interaksi berdasarkan pada pengalaman terdahulu dan derajat persetujuan atas apa yang

dianggapnya sebagai jangkauan orang lain. Cara yang ditunjukkan dengan nyata oleh individu-individu yang berinteraksi adalah semakin lama menjadi tersusun dalam satu keliling pola-pola interaksi dalam situasi sosial yang disebut peranan sosial. Peranan merupakan pola tingkah laku yang dilaksanakan oleh seorang individu dan saling interaksi sesuai ide dan posisi yang didudukinya dalam suatu sistem sosial sehingga akan melahirkan tanggung jawab yang berbeda pula (Roucek dan Warrant, 1984).

Soekanto (1992) mengatakan bahwa peranan atau peran merupakan pola tingkah laku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan. Peranan melekat pada diri seseorang sesuai dengan status dan kedudukan di dalam masyarakat. Peranan merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan kedudukan (status). Peranan adalah aspek dinamis dari status dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Peranan sebagai pola perikelakuan mempunyai beberapa unsur antara lain :

1. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini yang merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu.
2. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Hal ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu di dalam kenyataannya yang terwujud dalam pola perikelakuan yang nyata. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

Peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan melekat pada diri seseorang sesuai dengan status dan kedudukannya di masyarakat. Peranan adalah aspek dinamis dari status yang dimiliki oleh seseorang, peranan dapat dibeda-bedakan dalam tiga jenis yaitu (a) peranan yang ditentukan oleh masyarakat secara normatif, (b) peranan yang merupakan orientasi bagi individu, dan (c) peranan sebagai kegiatan atau perilaku (Abdulkadir, 1994). Menurut Linton dalam Mardikanto (1991), peranan mencakup seluruh pola kebudayaan yang dihubungkan dengan kedudukan tertentu, mencakup sikap, nilai dan perilaku yang ditentukan oleh masyarakat terhadap anggotanya yang berada pada posisi tertentu. Berdasarkan pada konsep ini maka peranan KPMD dipengaruhi oleh faktor dalam (kepribadian KPMD itu sendiri dan keadaan keluarganya) dan faktor luar (lingkungan masyarakat dan tempat tinggal).

Robert Lawang dalam Mardikanto (1991) berpendapat bahwa peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi, seperti perusahaan, keluarga, komunitas,

sekolah dan lain-lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam setiap peran ada hak dan kewajiban, seperti halnya juga kita lihat dalam status.

Berdasarkan pada konsep ini, kewajiban Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah memfasilitasi dan memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM-MP di desanya.

2. Konsep Kader

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2009), kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, dan sebagainya. Kader masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, kader merupakan tenaga masyarakat yang dianggap paling dekat dengan masyarakat (Anggraini, 2010).

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelestarian hasil kegiatan. Sebagai kader masyarakat, peran dan tugas membantu pengelolaan pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan dan RTM (Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2010).

Secara umum tugas dan tanggung jawab KPMD adalah:

- a. Memfasilitasi musyawarah-musyawarah yang ada di dusun dan desa.
- b. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan program PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa.
- c. Memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan di desa.
- d. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan program PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian hasil kegiatan.
- e. Mengikuti pertemuan bulanan dengan Pendamping Lokal (PL) yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan.
- f. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan. (Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2010).

Kriteria menjadi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah sebagai berikut:

- a. Warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- b. Bukan kepala desa atau perangkat desa maupun suami/istrinya.
- c. Bukan anggota BPD maupun suami/istrinya.
- d. Mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugas-tugasnya.
- e. Jujur, bertanggung jawab dan bersedia bekerja secara sukarela.
- f. Bisa membaca dan menulis.

3. Konsep Kemiskinan

Menurut Suharto (2005), kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi dan memuaskan keperluan dasar materialnya seperti pangan, sandang, dan papan untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan posisi sosial ekonominya.

Kemiskinan masyarakat pedesaan merupakan suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang diterapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan cukup hidup sehat yang diukur berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Lebih lanjut Suharto (2005) mengemukakan bahwa akar penyebab kemiskinan adalah segala sesuatu yang menyebabkan masyarakat pedesaan berada dalam kemiskinan yang disebabkan oleh penyebab natural, penyebab struktural dan penyebab kultural yang meliputi :

1) Penyebab Natural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan aset alam (*natural asset*) seperti : cuaca yang sulit ditebak dan musim yang tidak merata. Penyebab ini adalah penyebab yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat karena sifatnya dari alam, tidak diketahui oleh manusia dan waktunya tidak terbatas oleh waktu dan ruang.

2) Penyebab Struktural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh stuktural sosial ekonomi yang sedemikian rupa sehingga golongan masyarakat tertentu lambat,

cenderung mengalami kemiskinan karena kondisi struktur ekonominya yang rendah sehingga menyebabkan keterbatasan aset sosial (*social asset*), aset manusia (*human asset*), aset finansial (*financial asset*) dan aset fisik (*physical asset*).

3) Penyebab Kultural

Penyebab kultural disebabkan oleh keterbatasan aset budaya. Aset budaya (*cultural asset*) adalah mekanisme control yang mengendalikan pola tingkah laku anggota masyarakat pendukung. Kebudayaan sebagai sistem nilai, dan keyakinan yang mendominasi pola tingkah laku anggota masyarakat petani. Aset budaya sangat berfungsi dalam mekanisme control bagi pola tingkah laku masyarakat petani dimana dapat meningkatkan efektivitas masyarakat petani dalam menanggapi lingkungan.

Menurut Suharto (2005), Pengukuran penyebab-penyebab kemiskinan masyarakat pedesaan tersebut dilakukan berdasarkan indikator :

- a. Pola konsumsi.
- b. Tingkat partisipasi sosial.
- c. Sikap fatalis dan malas.
- d. Tingkat kepercayaan sosial.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena

lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin.

Menurut Fadliansyah (2010), Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti : pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani (2004) mengemukakan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Winarni dalam Sulistiyani (2004) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang mereka tidak menyadari. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan hendaknya tidak menjebak masyarakat dalam ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaiknya mengantarkan masyarakat pada proses kemandirian.

Menurut Gitosaputro (2005), pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri. Menurut Paul Freire dalam Keban dan Lele (1999, dalam Sulistiyani 2004), pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut

conscientization yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif.

Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Effendi (2004, dalam Aquino, 2011) mengemukakan beberapa pengertian pemberdayaan dan upaya pemberdayaan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan agar masyarakat memegang kekuasaan dan kontrol terhadap program, proyek atau kelembagaan berikut pengambilan keputusan dan kegiatan administrasi.
- 2) Partisipasi diraih melalui hati nurani, demokratisasi, dan kepemimpinan.
- 3) Partisipasi untuk pemberdayaan biasanya bercirikan terjadinya proses mandiri dalam perubahan tatanan kehidupan sosial politik.

Ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari upaya pemberdayaan adalah proses yang dilakukan dalam membantu masyarakat melalui pendidikan luar sekolah agar mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi mereka. Upaya pemberdayaan terdiri dari :

- (a) Alam, contohnya tanah, air, iklim, mineral, dan lain-lain.
- (b) Manusia, contohnya masyarakat dengan sikapnya, ketrampilan dan bakatnya.
- (c) Kelembagaannya, contohnya sekolah, tempat beribadah, pasar, instansi pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat lainya yang memenuhi kepentingan masyarakat.

Sumardjo (1999, dalam Alnev, 2012) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

- a) Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan).
- b) Mampu mengarahkan dirinya sendiri.
- c) Memiliki kekuatan untuk berunding.
- d) Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- e) Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003, dalam Alnev, 2012) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu

mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Ram P Yadop (1980, dalam Gitosaputro, 2005), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan secara sukarela dan atas kemauannya sendiri, yang dapat digolongkan dalam empat bentuk :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.
3. Partisipasi dalam menilai kemajuan-kemajuan program pembangunan.
4. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Madrie (1998, dalam Effendi, 2007), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut memanfaatkan hasil pembangunan, ikut mendapat keuntungan dari proses dan hasil pembangunan baik pembangunan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi atau pembangunan yang dilakukan pemerintah. Adanya keuntungan yang didapat dari hasil pembangunan itulah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan, meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraannya.

Selanjutnya Madrie (1998, dalam Effendi, 2007) mengemukakan bahwa untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat tersebut dirinci oleh beliau

dalam bentuk partisipasi dalam: (1) merencanakan dan memutuskan sendiri, (2) menerima, memberi informasi pembangunan, (3) menyumbang material, (4) menyumbang tenaga, memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun, (6) memelihara dan merawat hasil pembangunan.

Effendi (2007) mengemukakan bahwa untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai tingkat keikutsertaan atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses (1) merencanakan pembangunan dan ikut dalam pengambilan keputusan. Pada tahap perencanaan, masyarakat diajak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang mencakup pengelompokan masalah, potensi desa, dan pembangunan yang akan dilaksanakan, (2) swadaya masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam memikul beban pembangunan seperti memberikan sumbangan tenaga dan materi, (3) melaksanakan pembangunan yaitu ketelibatan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas fisik yang merupakan perwujudan program, yakni masyarakat menjadi tenaga kerja yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan, (4) monitoring dan evaluasi yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengukur atau memberikan penilaian sampai seberapa jauh tujuan program dapat dicapai dan penilaian terhadap bidang pembangunan misalnya fasilitas umum dan lainnya, dan (5) menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yaitu keterlibatan warga masyarakat dalam menerima hasil, menikmati keuntungan atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun secara langsung dari kegiatan yang telah dilakukan.

6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

PNPM-MP merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM-MP mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Program pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Pelaksanaan PNPM-MP memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM-MP berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (*Corporante Social Responcibility*) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2010).

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) kelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. 2010).

B. Kerangka Berfikir

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu program pemerintah yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Wilayah kerja dan target sasaran program PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah masyarakat pedesaan. Pelaksanaan PNPM-MP memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengolahan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.

Kegiatan PNPM-MP adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan dan pelestariannya.

Menurut Effendi (2007), peranan diartikan sebagai suatu tindakan ataupun perilaku yang harus dilaksanakan seseorang yang menempati suatu posisi tertentu dalam sistem sosial. Wujud dari keberpihakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat miskin adalah memberi ruang yang lebih kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PNPM-MP, termasuk para pelaku-pelaku yang dipilih dari wakil masyarakat. Salah satu pelaku yang mempunyai peranan penting sekali di dalam PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah peran dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang akan menjadi ujung tombak untuk jauh lebih mengenalkan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di tingkat dusun dan desa.

Tingkat peranan Kader Pemberdayaan masyarakat yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah tugas dari KPMD yang sesuai dengan petunjuk teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Berdasarkan uraian di atas, maka variabel

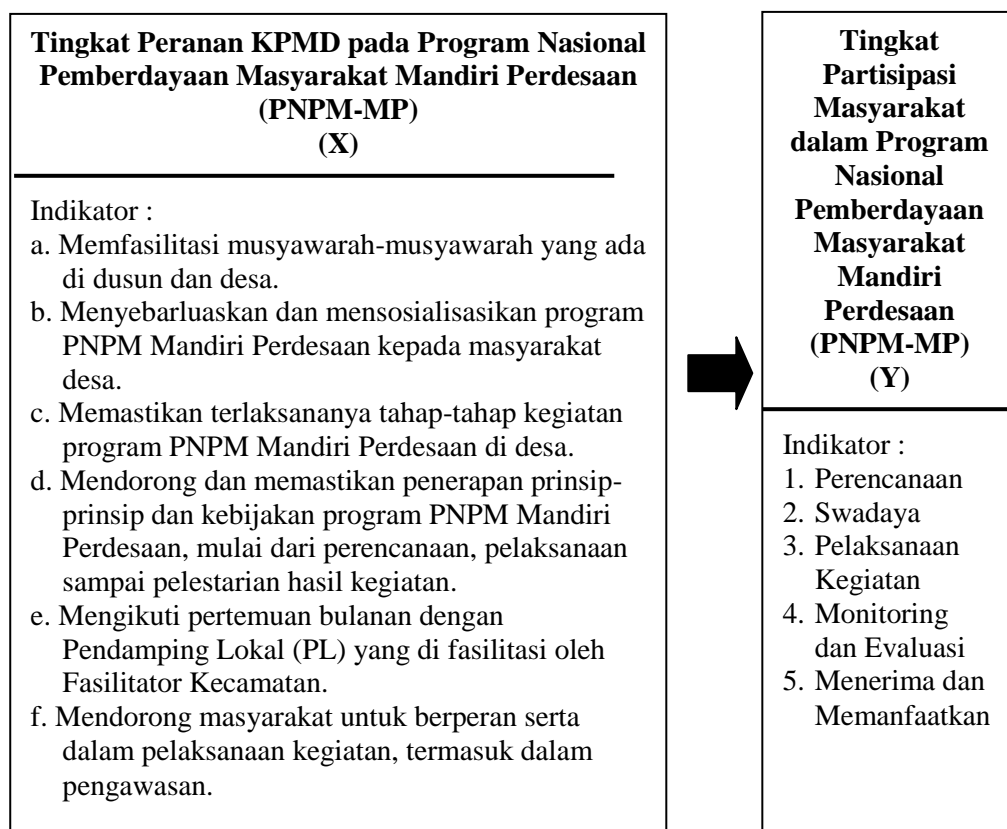
bebas (X) dalam penelitian ini adalah tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Beberapa peranan yang harus dilakukan oleh KPMD sebagai variabel bebas (X) yaitu:

- a. Memfasilitasi musyawarah-musyawarah yang ada di dusun dan desa.
- b. Menyebarkan dan mensosialisasikan program PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa.
- c. Memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan di desa.
- d. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan program PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian hasil kegiatan.
- e. Mengikuti pertemuan bulanan dengan Pendamping Lokal (PL) yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan.
- f. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.

Effendi (2007) mengemukakan bahwa untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai tingkat keikutsertaan atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses (1) perencanaan pembangunan, (2) swadaya masyarakat, (3) pelaksanaan kegiatan pembangunan, (4) monitoring dan evaluasi, (5) menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Secara sistematis tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan

tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Paradigma Tingkat Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga ada hubungan nyata antara tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan tingkat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.